

ABSTRAK

Penghapusan jabatan eselon III (Administrator) dan eselon IV (Pengawas) merupakan kewenangan Pemerintah. Maka sudah seharusnya Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas jabatan yang terkena dampak dari penghapusan jabatan tersebut (eselon III sebagai Administrator dan eselon IV sebagai Pengawas) agar secara pendapatan (finansial) mereka tidak dirugikan akibat adanya penghapusan jabatan tersebut khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Upaya Penghapusan Jabatan Eselon III (Administrator) dan Eselon IV (Pengawas) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan dan apa yang menjadi dampak dalam Penghapusan

Jabatan Eselon III (Administrator) dan Eselon IV (Pengawas) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Upaya Penghapusan Jabatan Eselon III (Administrator) dan Eselon IV (Pengawas) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan, dan untuk mengetahui dampak apa yang dihadapi dalam Penghapusan Jabatan Eselon III (Administrator) dan Eselon IV (Pengawas) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan.

Dengan perkembangan luar biasa dunia bisnis yang berbasis digital, efisiensi layanan-layanan di sektor swasta layak diterapkan di sektor pemerintahan. Digital government telah menjadi keniscayaan di mata para pemikir new public governance (NPG), terlebih di negara berkembang. Jika the internet of things betul-betul dipraktikkan

dengan secara mendalam di tubuh birokrasi negara-negara berkembang, digital government itu akan terwujud.

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amanat regulasi tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen pegawai berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan, yang menjadi permasalahan adalah dalam proses penempatan aspek profesionalitas seringkali dikesampingkan. Konsep *the right man on the right place* yang

seharusnya dijadikan acuan utama tidak berlaku. Penempatan pegawai yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat mampu secara efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan mutasi tersebut dapat diduga beberapa penempatan pejabat ada yang tidak sesuai dengan persyaratan kepangkatan. Berkaitan dengan ini, banyak spekulasi yang muncul dimana pemutasian pegawai cenderung didasarkan atas hubungan kekeluargaan serta pada pertimbangan „*like or dislike*“ (*spoil system*), ada indikasi sejumlah loyalis atau tim sukses pemenangan Bupati juga menduduki jabatan penting.

Dalam rangka menjamin terlaksananya roda pemerintahan yang baik dan bersih yang terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya usaha konkrit

dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan undang- undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan roda pemerintahan, baik yang bersifat birokrasi, legalisasi maupun bersifat pelayanan selalu menggunakan administrasi, administrasi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan- kegiatan lainnya. Administrasi selalu ada dan tidak bisa di tinggalkan, hal tersebut telah diatur dalam Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang- undang nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten

Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan Undang- undang nomor 2 tahun 2003 tersebut menandakan sahnya pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai salah satu kabupaten termuda di Propinsi Kalimantan Selatan, tentu banyak hal yang selalu dibenahi agar tidak jauh ketinggalan dan bisa sejajar dengan Kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Sebagai Kabupaten pemekaran Kabupaten Balangan sudah memiliki 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 24 Dinas dan 6 Badan yang salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol)

Wacana penghapusan jabatan eselon III dan IV telah diserukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Hal ini seperti dikemukakan Wakil Menteri PAN- RB, Eko Prasoj,

yang mengatakan program penghapusan eselon III dan IV mulai dijalankan tahun 2012. “Tujuannya untuk memindahkan orientasi pegawai dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penghapusan diharapkan mampu mengurangi biaya yang tidak diperlukan untuk memberikan fasilitas dinas dan jabatan kepada pejabat eselon III dan IV, penghapusan eselon tersebut juga dikarenakan banyak tugas di lingkup kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan bersama oleh 10 orang. Bukan hanya pemborosan uang negara, kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun sangat tidak efektif. Perampingan birokrasi ini juga dilakukan guna menjaring Pegawai Negeri berkualitas yang mampu melayani publik dengan baik.

Disisi lain, penghapusan jabatan eselon III dan IV bertujuan mengubah

pola pikir PNS yang selama ini cenderung mengejar jabatan tanpa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Pejabat yang memiliki sikap seperti itu tentunya merugikan pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut di atas, juga didukung Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, yang mengaku mendukung rencana Kementerian PAN-RB untuk mengurangi jabatan eselon di struktur organisasi PNS. Pihaknya bahkan mengusulkan agar jabatan fungsional yang akan ditambah sebagai pengganti dihapuskannya eselon III, IV, dan V, tidak hanya jabatan fungsional yang umum, melainkan juga yang khusus (Biro Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 1 Maret 2012).

Terkait dengan rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV, Deputi Kelembagaan Kemen PAN-RB,

Ismadi Ananda, menjelaskan pemerintah tidak hanya menjalankan program penghapusan ini begitu saja. Akan tetapi, sejak awal sudah menyiapkan upaya untuk memberikan kompensasi bagi PNS yang menduduki jabatan-jabatan tersebut. Kompensasi yang paling utama adalah, pemerintah menambah pos jabatan fungsional. Saat ini jabatan fungsional ada 116 unit. Apabila jabatan eselon III dan IV itu dihapus jabatan fungsional ditambah menjadi sekitar 200 unit.

Jabatan fungsional yang akan digenjut keberadaannya adalah analis jabatan, analis pegawai, analis keuangan, dan auditor. Dengan adanya jabatan analis-analis ini, diharapkan bisa mempermudah kementerian untuk mengusulkan pegawai baru.

Perampingan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi baik pemerintah pusat maupun daerah,

adalah salah satu point yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencananya untuk penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan jumlah tingkatan eselon pegawai negeri sipil. PNS yang terkena dampak dari penyederhanaan level eselon tersebut akan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi masing-masing PNS. Ini merupakan langkah lanjutan dari upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Keinginan atau rencana presiden untuk merampingkan birokrasi tersebut tentunya menimbulkan dampak dan tanggapan dari masyarakat, baik yang setuju maupun tidak setuju. Demikian juga tanggapan dari para PNS sendiri. Bahkan banyak PNS merasa galau menghadapi rencana tersebut. Menyikapi

hal itu, pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) bertindak cepat mengurai dilema yang akan dihadapi sehubungan dengan rencana perampingan birokrasi tersebut.

Memasuki masa pemerintahan periode kedua, Presiden Joko Widodo mengagas penyederhanaan reformasi birokrasi dengan wacana penghapusan level jabatan eselonisasi yang dinilai terlalu banyak. Beberapa waktu lalu, banyak K/L sudah melakukan pengkajian terhadap penataan birokrasi di lingkungannya masing-masing, tidak terkecuali Kementerian Dalam Negeri. Sebagai lembaga pengkajian di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri juga tidak lepas dari isu yang diwacanakan tersebut. Terlebih, Badan Litbang Kemendagri memiliki

tugas ganda. Selain memberikan rekomendasi terkait perampingan struktur organisasi di Kemendagri, juga harus mengkaji struktur organisasi yang pas berada di Badan Litbang itu sendiri. Wacana penataan ulang strukturisasi tersebut, mengawal diskusi Badan Litbang Kemendagri di 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Litbang Kemendagri, Senin (6/1). Diskusi semakin menarik, pasalnya berbicara lembaga kelit-bangan di K/L tidak lepas dari wacana penggabungan Badan Litbang ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta isu terkait UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tidak hanya itu, kehadiran UU tersebut juga oleh sebagian pihak dikhawatirkan akan menggerus tupoksi Badan Litbang Kemendagri dalam memfasilitasi Badan Litbang Daerah,

meskipun hanya satu daerah yang sudah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRID) yaitu provinsi Bali. Namun Kurniasih Kepala Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan tidak khawatir dengan adanya UU Sisnas Ip-tek tersebut. Menurutnya UU Sisnas Iptek tidak mematahkan regulasi sebelumnya. Justru UU tersebut bisa dikawinkan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbicara tupoksi kelitbangan. “Ini menjadi tugas kita, untuk mencari celah sebagai penguat. Jika kita lihat juga, di mana pun lembaga kelitbangan menjadi yang paling penting. Tidak ada kebijakan yang keluar kecuali berdasarkan hasil riset dalam semua organisasi termasuk perusahaan swasta. Kita juga bisa seperti itu, tinggal bagaimana mindset kita diubah dan bisa memberi masukan yang meyakinkan pimpinan,” ucapnya. Kurniasih juga

meyakini Badan Litbang Kemendagri akan memiliki trigger, karena memiliki pusat inovasi. Menurutnya itu menjadi salah satu ruang kepercayaan dalam menilai daerah inovatif. Fasilitasi kepada daerah juga akan semakin baik, terlebih jika Badan Litbang selama ini tidak melulu berada di zona nyaman.

Presiden Joko Widodo menginginkan struktur birokrasi pemerintahan yang lebih ramping. Langkah itu diambil agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien, terutama dalam menunjang investasi yang saat ini dinilai lesu akibat proses perizinan yang tak cepat. Dengan struktur yang ramping, diyakini mampu melipat proses pengambilan kebijakan, sehingga agenda pembangunan lekas terwujud. Guna merampingkan struktur itu, Presiden mengarahkan agar level disetiap lembaga pemerintahan disederhanakan, dari semula empat level

menjadi dua level menyisakan eselon I dan II. Sementara untuk eselon III dan IV bakal dialih-kan menjadi pejabat fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kom-petensi. Wacana penghapusan eselon itu disampaikan Presiden saat Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat di kompleks parlemen.

Perampingan ini tidak akan mengubah besaran penghasilan pegawai, tetapi lebih ke arah tugas. Untuk mewujudkan rencana itu, Menpan-RB akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia Dengan isu yang mengemuka terse-but, kementerian termasuk Kemen-dagri dan lembaga disibukkan dengan agenda

penyederhanaan struktur birokrasi. Seperti yang dilakukan Ke-mendagri misalnya, yang membentuk tim khusus mengurus agenda tersebut. Tim itu mengemban dua tugas, yakni menyederhanakan organisasi di ling-kup internal Kemendagri dan di ting-kat pemerintah daerah. Untuk internal Kemendagri, peran itu lebih banyak diemban Sekretariat Jenderal Ke-mendagri. Sedangkan perampingan di tingkat pemerintahan daerah, tugas itu banyak melibatkan Direktorat Jende-ral Otonomi Daerah. Sebagai pembina sekaligus pengawas bagi jalannya pe-merintahan daerah, peran itu menjadi konsen Kemendagri. Kepala Badan Pengembangan Sum-ber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri terus memastikan agar langkah penye-derhanaan itu sesuai dengan keinginan Presiden. Keinginan yang dimaksud, yakni memudahkan pelayanan publik,

perizinan, serta meningkatkan investasi. Tiga aspek itu merupakan hal penting dalam menunjang kemajuan bangsa, seperti membuka lapangan kerja sehingga terciptanya kesejahteraan. “Jangan sampai apa yang kita lakukan jadi anti klimaks, artinya enggak sesuai (tujuan), untuk penyederhanaan di internal Kemendagri, timnya sudah berkomunikasi dengan para pimpinan komponen. Masing-masing komponen diberikan kesempatan untuk mencermati bagaimana penyederhanaan dapat dilakukan. Tidak semua jabatan struktural di komponen cocok dialihkan menjadi fungsional, sehingga membutuhkan kecermatan. “Tidak bisa langsung seketika, untuk Direktorat Jenderal tertentu apakah betul menjadi fungsional akan lebih efektif, belum tentu. Sedangkan untuk penyederhanaan struktur organisasi di tingkat pemerintah daerah, Kemendagri juga sudah

memberikan pengarahan langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh.

Berdasarkan latar belakang dan pengamatan awal diatas, maka penulis tertarik untuk meeliti mengenai UPAYA PENGHAPUSAN JABATAN ESELON III (ADMINISTRATOR) DAN ESELON IV (PENGAWAS) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KABUPATEN BALANGAN

B. Rumusan Masalah

Penghapusan jabatan eselon III (Administrator) dan eselon IV (Pengawas) merupakan kewenangan Pemerintah. Maka sudah seharusnya Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas jabatan yang terkena dampak dari penghapusan jabatan tersebut (eselon III sebagai Administrator dan eselon IV sebagai Pengawas) agar secara pendapatan (finansial) mereka tidak dirugikan akibat adanya penghapusan jabatan tersebut khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka untuk memperjelas masalah yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Upaya Penghapusan Jabatan Eselon III (Administrator) dan Eselon IV (Pengawas) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan ?
2. Apa yang menjadi dampak dalam Penghapusan Jabatan Eselon III (Administrator) dan Eselon IV (Pengawas) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Upaya Penghapusan Jabatan Eselon III (Administrator) dan Eselon IV (Pengawas) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan
2. Untuk mengetahui dampak apa yang dihadapi dalam Penghapusan Jabatan Eselon III (Administrator) dan

Eselon IV (Pengawas) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemerintahan kedepan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai bahan informasi dan masukan dalam pelaksanaan penghapusan Jabatan eselon III (Administrator) dan eselon IV (Pengawas) dapat lebih selektif lagi
3. Bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan sebagai informasi penting dalam membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pelaksanaan penghapusan Jabatan eselon III (Administrator) Dan eselon IV (Pengawas) di Kabupaten Balangan

4. Bagi FISIP UNISKA untuk menambah bahan perpustakaan dan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang akan terjun langsung kelapangan dalam melakukan penelitian yang akan datang

5. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah khususnya di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud (R. Ahmad Barta, 1993). Dalam suatu penelitian metode sangat penting, sebab dengan metode kegiatan akan dapat

terlaksana dengan sistematis dan terarah, data yang didapatkan lebih akurat dan dapat dipercaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang ditunjukkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Kemudian disusun dan diinterpretasikan untuk mendapat kesimpulan. Penggunaan metode ini sesuai dengan pendapat Winarso Surakhmad yang menyatakan bahwa “metode deskriptif ini memuaskan diri pada masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual) dan metode ini meliputi pengumpulan, penyusunan, pengenalan, penganalisaan dan interpretasi data yang diperlukan”. (Winarso Surakhad, 1985). Hal ini ditetapkan pula oleh Sumandi Suryabrata yang mengatakan bahwa: “Tujuan penelitian / metode deskriptif adalah untuk membuat pencandraan

sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi/daerah tertentu”. (Sumardi Suryabrata, 1995: 18).

B. Tempat, Subjek dan Objek Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan. Alasan digunakan tempat tersebut karena tidak pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama sebelumnya. Disamping itu kesediaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan dan pegawai untuk dilakukan penelitian, dan paling penting data yang dikumpulkan ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan tersebut.

2. Subjek Penelitian

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Subjek berarti “pelaku” dalam pengkajian itu manusia dapat sebagai subjek

(1990:82). Penelitian ini mengambil subjek pejabat eselon III (Administrator) dan pejabat eselon IV (Pengawas) pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan

3. Objek Penelitian

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, objek berarti “hal, perkataan atau yang menjadi pokok pembicaraan, sasaran dan tujuan”. Penelitian ini mengambil objek yaitu penghapusan jabatan eselon III (Administrator) dan eselon IV (Pengawas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnya dan relevan dengan tujuan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan observasi (melihat laporan hasil kinerja pejabat eselon III dan IV), dokumentasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan

pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan.

Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah Upaya Penghapusan Jabatan Eselon III (Administrator) dan Eselon IV (Pengawas) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan

2. Wawancara

Wawancara atau interview menurut Black dan Champion (1992) dan Muslimin (2002) adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik penelitian sosial.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini

adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh data- data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Kepustakaan (*Libary Research*)

Yaitu dengan cara memepelajari buku-buku literatur, tulisan-tulisan, dan bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini untuk mendapatka dasar-dasar teoritis yang diperlukan sebagai landasan menganalisis masalah skripsi.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melihat catatan beberapa dokumen

yang ada diperusahaan yang ada hubungannya dengan penelitian

E. Teknik Pengolahan Data

1. Penyusunan Data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua ada yang dibutuhkan sudah terekap semua. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan dengan penelitian, dan benar-benar otentik.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha mengolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi terutama yang telah dibuat dan ditentukan oleh penelitian

3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk merumuskan masalahnya. Jenis data akan menentukan apakah

penelitian akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif.

F. Teknik Analisa Data

Dilakukan dengan pedoman pada data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan data kualitatif, yaitu membandingkan data-data yang diperoleh dilapangan dengan teori-teori dan kepustakaan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperoleh keseragaman pengertian dari istilah yang digunakan, maka perlu penjelasan sebagai berikut :

1. Upaya

Upaya adalah usaha atau sarat untuk mencapai sesuatu maksud atau tujuan tertentu dengan menggunakan akal fikiran yang disertai dengan ikhtiar.

2. Penghapusan

Penghapusan adalah proses, cara, perbuatan penghapusan (peniadaan, pembatalan dan sebagainya)

Pemerintahan dalam negeri untuk membantu Prisedin dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara

3. Jabatan

Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi

4. Eselon

Eselon adalah tingkat jabatan struktural atau jenjang jabatan dalam organisasi Pemerintahan (Permendagri Nomor 13 tahun 2002)

5. Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol)

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah salah satu Direktorat Jenderal pada Kementrian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan